

Implementasi Digital Governance dalam Administrasi Informasi Publik DISPUSIPDA Jawa Barat: Studi Kasus Pengelolaan Arsip dan Optimalisasi Layanan Perpustakaan Digital (CANDIL-Eplika)

Ii Sumantri¹, Fauzan Adhim Suparno², Intan Dwi Pramesti³, Muhammad Hafizh Nugraha⁴

¹²³⁴Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia,
fauzan.adhim2004@gmail.com¹, intandwprms@gmail.com², hafizhnggrha30@gmail.com³

Keywords:

Digital Governance,
 Archival
 Management,
 Digital Library,
 DISPUSIPDA,
 EGovernment

Abstract: *This study analyzes the implementation of digital governance in archive management and digital library services at DISPUSIPDA West Java. Using a qualitative descriptive approach and field observation, the research evaluates the effectiveness of digital transformation through platforms such as CANDIL and Eplika. The findings indicate that while digitalization has improved information accessibility, its implementation still faces various challenges, including limited infrastructure, lack of system interoperability, and weak human resource capacity. Moreover, the underutilization of user data has resulted in generic library services that are not sufficiently responsive to community literacy needs. The study concludes that DISPUSIPDA has the potential to become a data-driven smart institution if it can build an integrated digital system architecture, enhance user behavior analytics, and adopt evidence-based policies with public engagement. These findings contribute to the strengthening of digital public services and information governance in local government sectors.*

Keywords:

Tata Kelola Digital,
 Kearsipan,
 Perpustakaan
 Digital,
 DISPUSIPDA,
 EGovernance

Abstract: Penelitian ini menganalisis implementasi digital governance dalam pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan digital di DISPUSIPDA Jawa Barat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan observasi lapangan, studi ini mengevaluasi efektivitas transformasi digital melalui platform CANDIL dan Eplika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah meningkatkan aksesibilitas informasi, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya interoperabilitas sistem, serta lemahnya kapasitas SDM. Di sisi lain, belum optimalnya penggunaan data pengguna menyebabkan layanan perpustakaan masih bersifat generik dan tidak responsif terhadap kebutuhan literasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DISPUSIPDA memiliki potensi menjadi institusi cerdas berbasis data jika mampu membangun arsitektur sistem digital yang terintegrasi, memperkuat analitik perilaku pengguna, serta menerapkan kebijakan berbasis bukti dan melibatkan publik. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan digital public service dan tata kelola informasi di sektor pemerintahan daerah.

Introduction

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) menempati posisi penting sebagai institusi penyedia layanan informasi publik dan pengelola memori kolektif daerah. Dalam pelaksanaan fungsinya, DISPUSIPDA tidak hanya menangani aspek administratif semata, melainkan juga memiliki peran sosial dan budaya dalam mendokumentasikan kejadian, kebijakan, serta hasil intelektual yang bernilai sejarah dan pendidikan. Tanggung jawab vital ini dijalankan melalui dua sektor utama: pengelolaan arsip dan penyelenggaraan layanan perpustakaan. Peran ganda ini menempatkan DISPUSIPDA sebagai garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas kelembagaan dan melestarikan jejak peradaban daerah di tengah dinamika informasi yang semakin kompleks.

Dalam bidang kearsipan, DISPUSIPDA mengimplementasikan prinsip manajemen siklus hidup arsip, mulai dari proses penciptaan, pemanfaatan, penyimpanan, hingga pelestarian arsip sampai tahap arsip statis. Arsip dinamis terdiri atas arsip aktif dan inaktif, sedangkan arsip statis merupakan dokumen yang memiliki nilai informasi dan historis tinggi. Perpindahan arsip dari status aktif menuju inaktif dan selanjutnya menjadi arsip statis perlu dilaksanakan secara terstruktur dengan mengacu pada prinsip-prinsip ISO 15489-1:2016 serta Undang-Undang No. 43 Tahun 2009. Tahapan ini menjadi penting demi menjamin efisiensi pengelolaan informasi, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas kelembagaan dan pelestarian jejak administratif (International Council on Archives, 2016). Namun, prosedur deposit arsip inaktif oleh instansi pencipta kepada lembaga kearsipan seperti DISPUSIPDA, meskipun menjadi unsur fundamental dalam sistem kearsipan nasional, masih dihadapkan pada berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Berbagai studi dan pengamatan lapangan menunjukkan adanya keterbatasan fasilitas fisik maupun digital, belum adanya standar penyimpanan yang seragam, dan lemahnya sistem pelacakan serta kontrol arsip (Sari, 2016; Kamble & Trivedi, 2023). Keadaan ini semakin kompleks dengan rendahnya kesadaran terhadap regulasi kearsipan serta belum terintegrasinya sistem kearsipan konvensional dengan

teknologi digital (Katuu, 2022), yang secara signifikan mengancam keberlangsungan dan aksesibilitas memori kolektif daerah.

Di sisi lain, dalam penyelenggaraan perpustakaan, DISPUSIPDA Jawa Barat telah mengambil langkah progresif melalui pemanfaatan teknologi digital guna memperluas akses layanan literasi dan informasi. Salah satu inovasi unggulan adalah CANDIL (Maca Dina Digital), sebuah platform perpustakaan digital yang menghadirkan ribuan e-book dalam berbagai bahasa yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat luas. Inisiatif ini merupakan bentuk konkret dari upaya peningkatan akses informasi dan literasi berbasis digital. Selain itu, DISPUSIPDA juga membangun E-Library Jawa Barat (Eplika) yang memberikan kemudahan dalam pencarian koleksi melalui katalog daring (OPAC), serta layanan peminjaman berbasis web yang mempercepat distribusi informasi. Transformasi ini menunjukkan adanya penerapan prinsip digital governance, yaitu tata kelola sektor publik yang menggabungkan teknologi digital dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelayanan publik. Dalam konteks administrasi perpustakaan, digital governance tidak hanya sebatas digitalisasi bahan pustaka, tetapi juga mencakup interoperabilitas antar sistem, pengelolaan metadata, pemanfaatan data pengguna dalam skala besar (big data), serta sistem umpan balik berbasis teknologi (Silva & Dutra, 2024).

Penelitian oleh Ngulube & Tafor (2006) menunjukkan bahwa penerapan e-governance pada layanan informasi publik dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat transparansi, dan memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan literasi. Produk seperti CANDIL dan Eplika menjadi wujud konkret dari pelaksanaan prinsip digital governance, di mana akses terbuka, pelayanan yang efisien, serta pelibatan masyarakat terejawantahkan melalui inovasi teknologi. Hal ini selaras dengan konsep smart institution yang dikembangkan oleh Molina-Granja (2022), di mana perpustakaan digital bukan hanya menjadi tempat penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai pusat data yang mampu membaca kebutuhan masyarakat melalui analisis perilaku pembaca. Dalam jangka panjang, platform seperti CANDIL berpotensi menjadi fondasi data strategis untuk mendukung perumusan kebijakan

literasi berbasis kebutuhan pengguna, pengembangan koleksi berbasis permintaan (demand-driven acquisition), hingga integrasi dengan sistem pendidikan berbasis digital.

Kendati demikian, penerapan digital governance di sektor perpustakaan dan kearsipan tetap memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia, regulasi, maupun sarana teknologi. Kendala seperti kesenjangan akses digital (digital divide), keterbatasan akses internet, serta masih rendahnya literasi digital baik di kalangan masyarakat maupun aparatur lembaga kearsipan menjadi tantangan utama dalam pengembangan sistem layanan digital yang holistik (Nasidi & Jika, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh untuk mengukur efektivitas implementasi teknologi yang telah diterapkan, sekaligus penguatan kelembagaan melalui kebijakan berbasis data dan inovasi yang berkelanjutan

Literature Review

1. Governance Theory (Teori Tata Kelola Pemerintahan)

Governance, menurut Rhodes (1996), dapat didefinisikan sebagai "self-organizing, interorganizational networks characterized by interdependence, resource exchange, rules of the game, and significant autonomy from the state." Definisi ini menyiratkan pergeseran dari konsep pemerintahan tradisional (government) yang berpusat pada negara dan hirarkis, menuju bentuk tata kelola yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai aktor di luar negara. Ini menekankan bahwa pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi domain eksklusif pemerintah, melainkan melibatkan jalinan hubungan antaraktor yang saling bergantung.

Dalam konteks kontemporer, terutama relevan dengan administrasi publik dan pelayanan informasi, governance dapat dipahami sebagai mekanisme dan proses kolektif di mana berbagai aktor—termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil—berinteraksi dan berkolaborasi untuk mengelola urusan publik dan mencapai tujuan bersama, khususnya dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis (Peters, 2023). Hal ini mencakup bagaimana otoritas didistribusikan, keputusan diambil, dan kebijakan diimplementasikan melalui jaringan hubungan yang saling bergantung, bukan hanya melalui jalur komando hirarkis.

Dalam konteks penelitian ini, di mana DISPUSIPDA berupaya meningkatkan layanan melalui digitalisasi, governance menggarisbawahi pentingnya interaksi dan kemitraan antarpihak untuk memastikan efektivitas, responsivitas, dan inklusivitas pelayanan informasi publik. Governance Theory memiliki beberapa dimensi yang relevan dengan penelitian ini:

- Jaringan Aktor (Networks of Actors): Menjelaskan bagaimana DISPUSIPDA berinteraksi tidak hanya dengan instansi pemerintah pencipta arsip, tetapi juga dengan masyarakat pengguna perpustakaan, penyedia teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pelayanan digital (Kettl, 2002). Kerjasama ini vital dalam deposit arsip dan optimalisasi platform digital.
- Partisipasi dan Inklusivitas: Menyoroti pentingnya pelibatan berbagai pihak, termasuk warga negara, dalam proses tata kelola. Dalam konteks DISPUSIPDA, ini relevan dengan bagaimana umpan balik pengguna diakomodasi dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi pada pengembangan layanan digital, meskipun pendahuluan mengindikasikan adanya kelemahan dalam partisipasi ini.
- Akuntabilitas dan Transparansi: Mengkaji bagaimana mekanisme tata kelola memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh DISPUSIPDA dalam digitalisasi dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka bagi publik. Ini sejalan dengan upaya pelestarian jejak administratif dan akuntabilitas kelembagaan (Frederickson, 1999).
- Adaptabilitas dan Resiliensi: Menjelaskan kemampuan sistem tata kelola untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan (misalnya, kemajuan teknologi) dan mengatasi tantangan (misalnya, digital divide). Ini relevan dengan kebutuhan DISPUSIPDA untuk terus berinovasi dan mengatasi kendala digitalisasi.

2. Governance (Tata Kelola Digital)

Digital Governance, atau e-governance, didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk memfasilitasi partisipasi warga dalam proses pemerintahan (United Nations, 2003).

Definisi ini menekankan peran TIK sebagai alat transformatif yang memungkinkan pemerintah untuk berinteraksi lebih baik dengan warga, bisnis, dan lembaga lain, serta untuk menginternalisasi proses-proses pemerintahan itu sendiri.

Dalam konteks dan relevansi dengan pelayanan informasi publik serta pengelolaan aset pengetahuan daerah seperti di DISPUSIPDA, digital governance dapat diartikan sebagai pemanfaatan strategis teknologi digital untuk mentransformasi cara pemerintah berinteraksi dengan warga, menyediakan layanan, dan mengelola informasi, dengan tujuan meningkatkan nilai publik, partisipasi, dan efektivitas birokrasi (Gil-Garcia et al., 2020). Hal ini mencakup lebih dari sekadar digitalisasi data atau proses, tetapi melibatkan restrukturisasi tata kelola untuk memungkinkan interoperabilitas sistem, analisis data yang canggih, dan kanal komunikasi dua arah yang memperkuat akuntabilitas dan responsivitas. Penelitian ini akan menguji bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan melalui platform seperti CANDIL dan Eplika, serta dalam proses deposit arsip inaktif, dalam upaya DISPUSIPDA untuk mewujudkan pelayanan yang adaptif di era digital. Digital Governance memiliki dimensi-dimensi kunci yang relevan dengan penelitian ini:

- **Penyediaan Layanan Digital (E-Service Delivery):** Fokus pada bagaimana DISPUSIPDA menyediakan akses digital ke koleksi perpustakaan (CANDIL, Eplika) dan informasi kearsipan. Dimensi ini menyoroti efisiensi dan kemudahan akses bagi pengguna (Heeks, 2001).
- **Transparansi dan Akuntabilitas (E-Transparency & E-Accountability):** Mengukur sejauh mana sistem digital DISPUSIPDA meningkatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan. Ini relevan dengan upaya pelestarian jejak administratif dan akuntabilitas kelembagaan (Moon, 2002).
- **Partisipasi Warga (E-Participation):** Menilai sejauh mana teknologi digital dimanfaatkan untuk mendorong keterlibatan warga dalam proses layanan, seperti pemberian umpan balik atau co-creation konten, yang menurut pendahuluan masih menjadi tantangan di DISPUSIPDA (Lee, 2011).

- **Manajemen Informasi Digital (Digital Information Management):** Berfokus pada pengelolaan data dan informasi secara digital, termasuk interoperabilitas sistem, pengelolaan metadata, dan pemanfaatan big data untuk pengambilan keputusan berbasis kebutuhan pengguna, relevan dengan baik kearsipan maupun perpustakaan (Silva & Dutra, 2024).
- **Infrastruktur dan Kapasitas (Infrastructure & Capacity):** Mengkaji ketersediaan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia (pustakawan dan arsiparis), serta kebijakan pendukung yang diperlukan untuk keberhasilan digital governance (Ngulube & Tafor, 2006; Nasidi & Jika, 2023).

3. Smart Institution (Institusi Cerdas)

Molina-Granja (2022) mengembangkan konsep smart institution dengan merujuk pada organisasi yang mengintegrasikan teknologi digital, analisis data, dan pendekatan inovatif untuk menjadi lebih responsif, adaptif, dan prediktif dalam menjalankan fungsinya. Ini melibatkan kemampuan institusi untuk tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisisnya secara cerdas untuk memahami kebutuhan, tren, dan preferensi penggunanya, sehingga dapat menawarkan layanan yang lebih personal dan relevan. Dalam konteks DISPUSIPDA sebagai lembaga yang menyediakan layanan informasi dan mengelola memori kolektif, smart institution dapat didefinisikan sebagai organisasi yang secara proaktif mengintegrasikan teknologi digital canggih, analitik data besar, dan kecerdasan buatan untuk secara dinamis memahami dan merespons kebutuhan penggunanya, mengoptimalkan operasional, serta berinovasi dalam penyediaan layanan publik (Wong & Wang, 2021).

Ini berarti perpustakaan dan lembaga kearsipan memanfaatkan platform digital seperti CANDIL dan Eplika tidak hanya sebagai repositori informasi, tetapi sebagai pusat data yang mampu membaca dan memprediksi kebutuhan masyarakat melalui analisis perilaku pembaca dan pola penggunaan informasi. Tujuan akhirnya adalah menciptakan layanan yang sangat personalisasi, efisien, dan relevan dengan dinamika kebutuhan komunitas yang dilayani. Dimensi yang Relevan terhadap Penelitian: Konsep Smart Institution relevan melalui dimensi-dimensi berikut:

- Analisis Data Pengguna (User Data Analytics): Kemampuan DISPUSIPDA untuk mengumpulkan dan menganalisis data penggunaan CANDIL dan Eplika (misalnya, buku yang paling sering dibaca, durasi membaca, preferensi genre) untuk memahami kebutuhan literasi masyarakat (Molina-Granja, 2022).
- Layanan Berbasis Kebutuhan (Demand-Driven Services): Transformasi dari penyediaan layanan generik menjadi layanan yang disesuaikan dengan permintaan dan preferensi spesifik pengguna, berdasarkan analisis data tersebut (Molina-Granja, 2022). Ini dapat diaplikasikan pada pengembangan koleksi atau program literasi.
- Keterhubungan Sistem (System Interoperability): Kemampuan platform digital untuk berintegrasi tidak hanya secara internal tetapi juga dengan sistem lain (misalnya, sistem pendidikan) untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih luas dan cerdas. Ini penting untuk efisiensi dan pengalaman pengguna yang mulus.
- Inovasi Berkelanjutan: Proses berkesinambungan dalam mengembangkan dan mengadaptasi teknologi serta layanan berdasarkan insight dari data dan umpan balik pengguna, untuk tetap relevan dan efektif di era digital.

Konsep Dasar Arsip dan Nilai Strategisnya

Arsip merupakan aset penting yang memiliki nilai sejarah dan menjadi tolok ukur perkembangan organisasi maupun negara. Dalam konteks manajemen kearsipan, arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun, namun tetap harus dipelihara dan dikelola secara profesional karena masih memiliki nilai informasi dan dapat dibutuhkan sewaktu-waktu (Fadhillah, 2022). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memberikan definisi komprehensif mengenai arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang memiliki nilai guna. Secara lebih rinci, Pasal 1 Ayat 2 UU ini menyatakan bahwa:

"Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk corak apapun, baik berupa tulisan, gambar, suara, video, maupun elektronik, yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,

atau perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Pengelolaan arsip inaktif yang baik bertujuan untuk menjaga kelestarian informasi, mendukung efisiensi ruang dan biaya, serta memastikan keamanan dan kemudahan akses terhadap arsip tersebut. Sementara itu tujuan dari pengelolaan arsip inaktif adalah mencegah terjadinya kerumitan sehingga terciptanya ketertiban dalam penyelenggaraan aktivitas sebuah lembaga atau instansi. Selain mengurangi jumlah arsip inaktif, pengelolaan tetap menyelamatkan kandungan isi arsip inaktif. Bahkan pengelolaan yang baik mempermudah dalam temu balik arsip inaktif yang dibutuhkan (Virgsefni & Rahmah, 2021).

Konsep Dasar Arsip dan Nilai Strategisnya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA) mengelola perpustakaan digital melalui aplikasi CANDIL (Maca Dina Digital Library), yang menyediakan ribuan koleksi buku elektronik untuk memudahkan akses informasi masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu. Aplikasi ini diluncurkan sejak Desember 2018 dan terus dikembangkan secara berkala untuk mendukung budaya baca dan pembelajaran masyarakat Jawa Barat (Azizah, 2022). Selain itu, DISPUSIPDA juga menyediakan layanan perpustakaan online yaitu E-Library Jawa Barat (Eplika) yang didalamnya diatur melalui Online Public Access Catalog (OPAC) yang memungkinkan pengguna mencari dan mengakses koleksi perpustakaan secara digital dengan mudah.

Kedua aplikasi ini berperan penting dalam mendukung manajemen arsip dan preservasi informasi, khususnya arsip inaktif yang disimpan dan dikelola secara digital untuk memastikan keutuhan, keamanan, dan kemudahan akses jangka panjang. Dengan dukungan teknologi digital seperti CANDIL dan OPAC, DISPUSIPDA mampu menjangkau komunitas pembaca yang lebih luas dan meningkatkan efektivitas layanan perpustakaan serta pengelolaan arsip secara modern. Sekalipun dalam prosesnya masih transisi menuju digitalisasi dan masih banyak yang belum dapat disajikan atau masih dipertimbangkan.

Research Methods

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif deksriptif dan observasi secara langsung mengenai arsip inaktif yang dikelola di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks melalui pemahaman makna, pola, dan narasi yang muncul dari data sekunder (Creswell & Poth, 2018).

Pendekatan yang digunakan ini adalah deskriptif, di mana penulis secara aktif melakukan observasi, pencatatan, serta analisis terhadap proses administrasi perpustakaan dinamis dan inaktif yang melibatkan aplikasi CANDIL (Maca Dina Digital) dan koleksi digital DISPUSIPDA yang terdata dalam OPAC (Online Public Access Catalog). Selain itu, penulis juga mempelajari pelaksanaan pendataan arsip dan pengelolaannya baik secara langsung ataupun pendataan digital. Dengan metode tersebut, penulis berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai Implementasi Digital Governance dalam Administrasi Informasi Publik DISPUSIPDA Jawa Barat.

Results

Implementasi Digital Governance dalam Pengelolaan Arsip Inaktif DISPUSIPDA

Hasil penelitian terdahulu, observasi, dan penerapan digital governance di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pengelolaan arsip inaktif masih menghadapi kendala struktural dan teknologis. Mekanisme deposit arsip dari instansi pencipta belum dilakukan secara konsisten dan tidak terstandar. Kelemahan ditemukan dalam belum optimalnya penyediaan ruang fisik dan sistem pengelolaan digital, rendahnya pemanfaatan teknologi digital untuk pelacakan dan kontrol arsip, lemahnya integrasi antara sistem perpustakaan digital (seperti CANDIL dan OPAC) dengan pengelolaan arsip inaktif, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi digital dan pemahaman prinsip kearsipan modern.

Sebagian besar pengelolaan arsip inaktif masih mengandalkan sistem manual, meskipun telah tersedia infrastruktur awal untuk transformasi digital. Situasi ini sejalan dengan temuan Sari (2016) yang mencatat bahwa sebagian besar instansi daerah

menghadapi kesulitan dalam menjalankan manajemen kearsipan akibat lemahnya sistem informasi dan minimnya kesadaran arsiparis.

DISPUSIPDA telah mulai membangun infrastruktur digital melalui OPAC dan CANDIL, namun fokus utama platform tersebut masih pada penyediaan informasi koleksi pustaka, belum pada otomasi dan preservasi arsip inaktif. Katuu (2022) menekankan pentingnya interoperabilitas sistem dan integrasi manajemen informasi agar transformasi digital tidak sebatas digitalisasi koleksi, tetapi juga mendukung akuntabilitas dan efisiensi layanan publik.

Dalam konteks governance theory, DISPUSIPDA masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif dan berbasis data yang diharapkan. Menurut Rhodes (1996), governance menuntut interaksi lintas aktor yang bersifat horizontal, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan pendekatan yang terfragmentasi dan birokratis.

- DISPUSIPDA perlu mengadopsi prinsip governance modern yang mencakup:
- Kolaborasi antarlembaga dalam proses deposit arsip, sebagaimana ditekankan oleh Kettl (2002) yang melihat jaringan aktor sebagai kunci efektivitas layanan publik;
- Akuntabilitas digital, melalui penguatan sistem pelaporan arsip dan pelacakan digital, sesuai panduan ISO 15489-1:2016 dan prinsip e-accountability (Moon, 2002);
- Adaptabilitas teknologi, yang mensyaratkan integrasi penuh antara sistem arsip dan sistem informasi publik, sebagaimana diuraikan dalam Gil-Garcia et al. (2020).

Hal ini dapat digambarkan dalam tabel diskusi komparatif antara kondisi empiris DISPUSIPDA dan prinsip governance:

Tabel 1. Komparasi Aspek/Dimensi, Temuan, dan Teori

Aspek Governance	Temuan di DISPUSIPDA	Teori & Studi Relevan
Jaringan Aktor (Networks)	Minim interaksi dengan instansi pencipta arsip	Kettl (2002); Sari (2016)

Akuntabilitas & Transparansi	Tidak ada sistem pelaporan digital arsip masuk ISO 15489-1:2016;	Frederickson (1999); Kamble & Trivedi (2023)
Adaptabilitas Teknologi	Sistem digital belum mencakup pengelolaan arsip inaktif	Gil-Garcia et al. (2020); Katuu (2022)
Partisipasi & Umpan Balik	Publik Tidak tersedia kanal masukan dari publik terkait arsip	Lee & Kwak (2011); Ngulube & Tafor (2006)
Interoperabilitas & Standarisasi	Tidak ada SOP digitalisasi dan pelabelan arsip inaktif	International Council on Archives (2016); Nasidi & Jika (2023)

Source: Diolah oleh Peneliti, 2025

DISPUSIPDA berpotensi menjadi pelopor institusi berbasis smart governance, namun hal ini baru dapat tercapai bila tata kelola arsip dirombak dengan pendekatan kolaboratif, digital, dan berbasis data. Penelitian oleh Wong & Wang (2021) menegaskan bahwa keberhasilan digital governance tidak semata tergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada tata kelola partisipatif dan fleksibel yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

Upaya penguatan kapasitas SDM arsiparis, integrasi antar sistem arsip dan pustaka, serta penetapan standar digitalisasi arsip yang mengacu pada best practices internasional (misalnya Molina-Granja, 2022) merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip tidak hanya efisien, tetapi juga akuntabel dan inklusif.

Optimalisasi Layanan Perpustakaan Digital melalui CANDIL dan Eplika

DISPUSIPDA Jawa Barat telah menginisiasi pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses literasi publik melalui dua platform utama: CANDIL (Maca Dina Digital Library) dan Eplika (E-Library Jawa Barat). CANDIL menyediakan akses gratis ke ribuan e-book dalam berbagai bahasa, sedangkan Eplika mengintegrasikan sistem katalog digital

berbasis OPAC (Online Public Access Catalog) yang memungkinkan pengguna mencari dan mengakses koleksi secara efisien.

Selama observasi lapangan, ditemukan bahwa kedua platform tersebut telah membawa manfaat nyata seperti. Peningkatan akses layanan perpustakaan secara daring, terutama selama dan pasca pandemi COVID-19, Peningkatan jumlah pengguna yang mengakses layanan secara mobile, khususnya pelajar dan mahasiswa dari wilayah luar kota, Penyediaan koleksi berbasis kebutuhan lokal, seperti buku sejarah daerah dan kebudayaan Sunda.

Namun, tantangan dalam penerapannya juga ditemukan, yaitu: Belum tersedianya fitur personalisasi seperti rekomendasi berbasis riwayat pengguna, Terbatasnya kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk pemanfaatan data pengguna dalam pengembangan kurikulum literasi, Keterbatasan integrasi antara data pengguna CANDIL dengan sistem perpustakaan konvensional untuk membentuk profil literasi daerah. Melihat hal tersebut perlu diperhatikan juga beberapa faktor yang diantaranya:

1. Kesenjangan persebaran literasi digital antar kota dan kabupaten di Jawa Barat. Kabupaten dengan tingkat penetrasi internet rendah tercatat lebih sedikit mengakses layanan CANDIL dan Eplika, menunjukkan perlunya strategi distribusi konten berbasis wilayah.
2. Belum tersedia dashboard analitik pengguna berbasis wilayah dan demografi, sehingga pengambilan keputusan pengembangan koleksi masih berdasarkan asumsi, bukan data riil perilaku pengguna.
3. E-book lokal produksi DISPUSIPDA (seperti dongeng daerah, pidato Gubernur, atau manuskrip lokal) masih terbatas jumlahnya dan belum sepenuhnya terkurasi secara digital, padahal berpotensi menjadi kekuatan literasi berbasis kearifan lokal.

Transformasi layanan perpustakaan DISPUSIPDA mencerminkan prinsip Digital Governance, khususnya dalam dimensi e-service delivery dan e-participation. Platform seperti CANDIL dan Eplika menciptakan saluran digital yang memperpendek jalur distribusi informasi dan membuka akses literasi lintas geografis. Hal ini sesuai dengan

gagasan Heeks (2001) dan Moon (2002) tentang peran e-governance dalam mendorong efisiensi birokrasi dan transparansi pelayanan publik.

Namun, dari perspektif Smart Institution, masih terdapat ruang untuk penguatan, khususnya dalam. Dalam konteks e-participation, DISPUSIPDA belum mengoptimalkan keterlibatan pengguna dalam pengembangan layanan, seperti fitur rating koleksi, komunitas pembaca, atau crowdsourcing konten lokal. Menurut Lee & Kwak (2011), partisipasi warga adalah fondasi keterlibatan publik yang strategis dalam governance berbasis digital. DISPUSIPDA telah berada pada jalur yang tepat dalam transformasi layanan literasi publik. Namun, inovasi digital harus disertai dengan transformasi data, di mana perilaku pengguna bukan hanya diakses, tetapi dianalisis dan dimanfaatkan untuk merancang kebijakan, mengembangkan koleksi, serta menghubungkan ekosistem informasi daerah.

Tantangan Penerapan Teknologi Digital dan Kapasitas SDM dalam Transformasi Informasi Publik DISPUSIPDA

Transformasi digital dalam pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan oleh DISPUSIPDA Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari dinamika kesiapan institusi, baik dari sisi teknologi maupun kapasitas sumber daya manusia. Meskipun DISPUSIPDA telah merintis pemanfaatan platform digital seperti CANDIL dan OPAC, proses digitalisasi yang ideal masih menghadapi berbagai kendala sistemik yang memperlambat pencapaian tata kelola informasi yang adaptif dan inklusif.

Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya infrastruktur teknologi yang merata di seluruh unit kerja dan wilayah layanan DISPUSIPDA. Dalam pengamatan lapangan, fasilitas teknologi seperti perangkat keras, jaringan internet berkecepatan tinggi, dan sistem backup digital yang andal masih belum tersedia secara menyeluruh. Keterbatasan ini berdampak langsung pada ketidakseimbangan kualitas layanan digital yang diterima masyarakat, terutama di wilayah-wilayah kabupaten dengan konektivitas internet yang rendah. Kesenjangan infrastruktur ini memperkuat fenomena digital divide, di mana akses terhadap informasi publik menjadi tidak merata, meskipun platform digital telah tersedia (Nasidi & Jika, 2023).

Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang signifikan. Arsiparis dan pustakawan di DISPUSIPDA belum seluruhnya memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk mengelola sistem informasi berbasis digital secara optimal. Banyak pegawai yang masih menggunakan pendekatan manual dalam proses klasifikasi, pelabelan, dan penyimpanan arsip inaktif, serta belum terbiasa menggunakan analitik data pengguna untuk pengembangan koleksi digital. Hal ini sejalan dengan temuan Ngulube dan Tafor (2006) yang menunjukkan bahwa keberhasilan digital governance di sektor informasi publik sangat tergantung pada pembangunan kapasitas berkelanjutan, pelatihan teknis, dan literasi digital aparatur lembaga.

Lebih lanjut, permasalahan interoperabilitas sistem digital internal juga turut menghambat efisiensi transformasi. Platform CANDIL dan OPAC saat ini belum terhubung secara fungsional dengan sistem arsip internal DISPUSIPDA, sehingga pertukaran data antara unit pustaka dan unit arsip masih harus dilakukan secara manual. Keadaan ini menurunkan efektivitas proses temu balik informasi dan memperbesar risiko inkonsistensi data. Seharusnya, dalam kerangka digital governance, integrasi sistem informasi antarsektor menjadi komponen esensial untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik (Gil-Garcia et al., 2020).

Kurangnya sistem umpan balik pengguna berbasis digital menjadi tantangan tambahan. Saat ini, belum tersedia mekanisme dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan masukan secara langsung terhadap konten, kualitas, maupun kebutuhan informasi yang mereka hadapi. Akibatnya, penyediaan layanan cenderung top-down dan tidak responsif terhadap dinamika kebutuhan pengguna. Padahal, partisipasi warga adalah inti dari tata kelola digital yang partisipatif, sebagaimana dikemukakan oleh Lee & Kwak (2011) dalam model open government implementation.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini memperlihatkan bahwa penerapan teknologi digital dalam tata kelola informasi DISPUSIPDA masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek strategis institusi secara menyeluruh. Transformasi teknologi yang hanya berfokus pada adopsi perangkat lunak tanpa memperkuat fondasi kapasitas kelembagaan akan menghasilkan sistem yang lemah dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang mencakup investasi infrastruktur,

pengembangan kapasitas SDM, serta reformasi proses internal agar prinsip-prinsip smart governance dapat diimplementasikan secara utuh dan berkelanjutan (Wong & Wang, 2021).

Selain itu, perumusan kebijakan berbasis data (data-driven policy) juga menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, DISPUSIPDA belum mengembangkan dashboard pemantauan literasi publik atau pengelolaan arsip inaktif secara real-time. Padahal, penerapan predictive analytics dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dalam manajemen koleksi dan pengelolaan dokumen, sekaligus memperkuat kemampuan institusi dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, membangun institusi yang cerdas (smart institution) bukan hanya membutuhkan platform digital, melainkan kemampuan membaca data dan menggunakannya untuk berinovasi secara berkelanjutan (Molina-Granja, 2022).

Evaluasi Strategis dan Rekomendasi Sistem untuk Penguatan Digital Governance di DISPUSIPDA

Transformasi digital yang telah dilakukan oleh DISPUSIPDA Jawa Barat melalui pengembangan layanan seperti CANDIL dan Eplika merupakan langkah maju dalam penyediaan informasi publik yang adaptif. Namun, untuk mewujudkan sistem layanan arsip dan perpustakaan digital yang berkelanjutan, DISPUSIPDA perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik-praktik yang berjalan saat ini dan mengadopsi strategi pembaruan yang berbasis bukti dan bersifat sistemik. Secara strategis, evaluasi terhadap implementasi digital governance di DISPUSIPDA menunjukkan bahwa inisiatif digital yang telah dilaksanakan bersifat terbatas pada aspek penyediaan akses, namun belum menyentuh optimalisasi fungsi tata kelola digital secara penuh. Dalam kerangka Gil-Garcia et al. (2020), digital governance bukan hanya soal teknologi, melainkan juga bagaimana organisasi publik membangun struktur, proses, dan budaya yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data, kolaboratif, dan responsif terhadap warga.

Salah satu temuan utama dalam evaluasi ini adalah bahwa DISPUSIPDA belum memiliki arsitektur sistem digital yang terintegrasi antara manajemen arsip dan perpustakaan. Hal ini menyebabkan data informasi publik tersebar di beberapa platform tanpa keterhubungan logis yang mendukung pelayanan berbasis pengguna. Sistem

seperti CANDIL dan OPAC belum dapat dimanfaatkan sebagai satu kesatuan ekosistem digital yang memungkinkan proses temu balik informasi lintas sektor (literasi, sejarah, pemerintahan). Padahal, dalam konsep interoperabilitas digital, hal tersebut menjadi kunci untuk membangun institusi berbasis pengetahuan (Katu, 2022).

Selain itu, ketiadaan sistem evaluasi internal yang berbasis dashboard kinerja layanan digital juga menjadi kekurangan serius. Hingga saat ini, DISPUSIPDA belum mengembangkan metrik kinerja atau indikator keberhasilan layanan digital, baik untuk arsip maupun perpustakaan. Hal ini berakibat pada sulitnya menilai sejauh mana platform digital yang telah diluncurkan benar-benar digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh publik. Sementara itu, berbagai studi, seperti oleh Wong & Wang (2021), menekankan pentingnya penggunaan real-time data untuk memonitor penggunaan layanan publik digital agar pemerintah dapat menyesuaikan strateginya secara adaptif.

Dalam konteks ini, evaluasi juga harus mencakup aspek regulasi dan kebijakan kelembagaan. Belum adanya kebijakan internal DISPUSIPDA yang mendorong integrasi data antar unit, penggunaan analitik perilaku pengguna, serta pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi digital SDM menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi belum dibarengi oleh reformasi kelembagaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Molina-Granja (2022), smart institution dibangun melalui data-driven culture, bukan hanya adopsi perangkat teknologi.

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi sistem yang dapat disampaikan berdasarkan temuan dan evaluasi penelitian ini meliputi:

1. Penyusunan Arsitektur Layanan Digital Terpadu, yang mengintegrasikan manajemen arsip dan perpustakaan ke dalam satu platform berbasis interoperabilitas. Ini mencakup integrasi antara sistem OPAC, CANDIL, dan sistem manajemen arsip internal DISPUSIPDA.
2. Pembangunan Dashboard Analitik Layanan, sebagai alat evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan, yang menampilkan data peminjaman, pencarian, pengunggahan arsip, serta segmentasi pengguna berdasarkan wilayah dan demografi.

3. Penguatan Kebijakan Kelembagaan Digital, melalui penyusunan SOP baru terkait alur kerja digital, pelatihan rutin bagi pustakawan dan arsiparis, serta penerapan standar internasional seperti ISO 15489-1:2016 dalam pengelolaan arsip digital.
4. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan dan Komunitas Literasi, untuk memperluas pemanfaatan platform digital, sekaligus membangun konten lokal dan meningkatkan partisipasi warga dalam pengembangan koleksi.
5. Penerapan Prinsip Demand-Driven Service, yakni dengan menggunakan data perilaku pengguna untuk menyusun kebijakan koleksi dan pengembangan konten literasi sesuai dengan kebutuhan real-time masyarakat.

Rekomendasi-rekomendasi ini selaras dengan pendekatan smart governance yang menekankan pada efisiensi, adaptivitas, keterbukaan, dan partisipasi warga (Moon, 2002; Lee & Kwak, 2011). DISPUSIPDA dapat menjadi percontohan nasional dalam transformasi layanan informasi publik berbasis teknologi apabila mampu mengembangkan model layanan yang tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga pada keberlanjutan, inklusivitas, dan ketahanan kelembagaan.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan digital governance dalam administrasi informasi publik oleh DISPUSIPDA Jawa Barat telah mengalami kemajuan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Pada aspek pengelolaan arsip inaktif, ditemukan bahwa mekanisme deposit arsip dari instansi pencipta ke DISPUSIPDA belum berjalan optimal, dengan hambatan berupa rendahnya integrasi sistem, minimnya infrastruktur digital, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Meskipun sudah terdapat perangkat awal seperti OPAC dan penguatan regulasi seperti ISO 15489-1:2016, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola digital yang efektif, inklusif, dan akuntabel.

Di sisi lain, DISPUSIPDA telah menunjukkan transformasi positif dalam penyediaan layanan perpustakaan berbasis digital melalui platform CANDIL dan Eplika. Keduanya mampu meningkatkan akses literasi masyarakat secara luas dan merepresentasikan dimensi e-service delivery dalam kerangka digital governance.

Namun, pemanfaatan teknologi belum disertai dengan pengembangan sistem umpan balik pengguna, dashboard analitik, maupun integrasi antarsistem yang memadai. Hal ini menghambat upaya menuju institusi cerdas (smart institution) yang berbasis pada data dan kebutuhan pengguna.

Secara keseluruhan, keberhasilan transformasi digital DISPUSIPDA sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk menyatukan arsitektur sistem informasi, meningkatkan kapasitas digital SDM, serta merumuskan kebijakan internal berbasis data yang mendorong kolaborasi, interoperabilitas, dan responsivitas layanan publik. Dengan demikian, DISPUSIPDA memiliki potensi besar menjadi percontohan dalam tata kelola informasi digital daerah, asalkan mampu mengatasi tantangan struktural dan berinvestasi secara berkelanjutan dalam infrastruktur, SDM, serta inovasi teknologi.

References

The references list all sources cited in the article. The format follows APA 7 style.

- Azizah, E. F. (2022). Efektivitas aplikasi Maca Dina Digital Library (CANDIL) dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan di DISPUSIPDA Jawa Barat (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/55262>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications. Frederickson, H. G. (1999). The repositioning of American public administration. *PS: Political Science & Politics*, 32(4), 701–711. <https://doi.org/10.1017/S1049096500056024>
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2020). Digital government and public management research: Finding the crossroads. *Public Management Review*, 22(5), 633–645. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1695883>
- Heeks, R. (2001). Understanding e-governance for development (IDPM Working Paper No. 11). University of Manchester. https://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/gdi/publications/workingpapers/di/d_wp1_1.pdf

- International Council on Archives. (2016). Principles and functional requirements for records in electronic office environments. ICA.
- ISO 15489-1:2016. (2016). Information and documentation – Records management – Part 1: Concepts and principles.
- Kamble, S., & Trivedi, M. (2023). Best practices in archive and record management in electronic age: Approaches and challenges.
- Katuu, S. (2022). Management of public sector records in the digital age.
- Kettl, D. F. (2002). The transformation of governance: Public administration for twentyfirst century America. Johns Hopkins University Press.
- Lee, G., & Kwak, Y. H. (2011). Open government implementation model: A stage model for achieving increased public engagement. *Government Information Quarterly*, 28(4), 355– 365. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.06.006>
- Molina-Granja, F., & Paucar-León, V. J. (2022). Model of long-term preservation of digital documents in institutes of higher education. In *Lecture Notes in Computer Science*. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-15346-6_34
- Molina-Granja, M. (2022). Smart public institutions: Data-driven service design for local governments. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101764. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101764>
- Moon, M. J. (2002). The evolution of e-government among municipalities: Rhetoric or reality? *Public Administration Review*, 62(4), 424–433. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00196>
- Nasidi, N. A., & Jika, A. Z. (2023). Digital archiving and the establishment of open access digital repositories in selected Nigerian universities.
- Nasidi, Q., & Jika, A. (2023). E-governance and capacity building in developing countries: The Nigerian perspective. *International Journal of Public Sector Management*, 36(1), 91–108. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-07-2022-0172>
- Ngulube, P., & Tafor, V. F. (2006). The management of public records and archives in the member countries of ESARBICA. *Journal of the Society of Archivists*, 27(1), 57–83. <https://doi.org/10.1080/00379810600682178>

- Peters, B. G. (2023). *The politics of governance: Public management in the modern state* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003211193>
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Sari, N. (2016). *Evaluasi implementasi manajemen kearsipan pada instansi pemerintah daerah* (Tesis Magister, Universitas Indonesia).
- Silva, D. F., & Dutra, J. P. (2024). Digital information governance and big data in public administration. *Information Polity*, 29(1), 15–33. <https://doi.org/10.3233/IP-239001>
- Silva, J. E., & Dutra, M. S. (2024). The disposal of paper public documents in the face of their digitization: What is lost? *Archival Science*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s10502-023-09400-7>
- United Nations. (2003). *World public sector report: E-government at the crossroads*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://publicadministration.un.org/en/Research/World-Public-Sector-Reports>
- Virgsefni, W., & Rahmah, E. (2021). Pengelolaan arsip inaktif di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kearsipan*, 15(2), 45–60.
- Wong, W., & Wang, M. (2021). Smart institutions for smarter cities: Frameworks for responsive digital public services. *Journal of Urban Technology*, 28(1–2), 95–112. <https://doi.org/10.1080/10630732.2020.1828040>